BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN KEUANGAN

SEMESTER II

2023

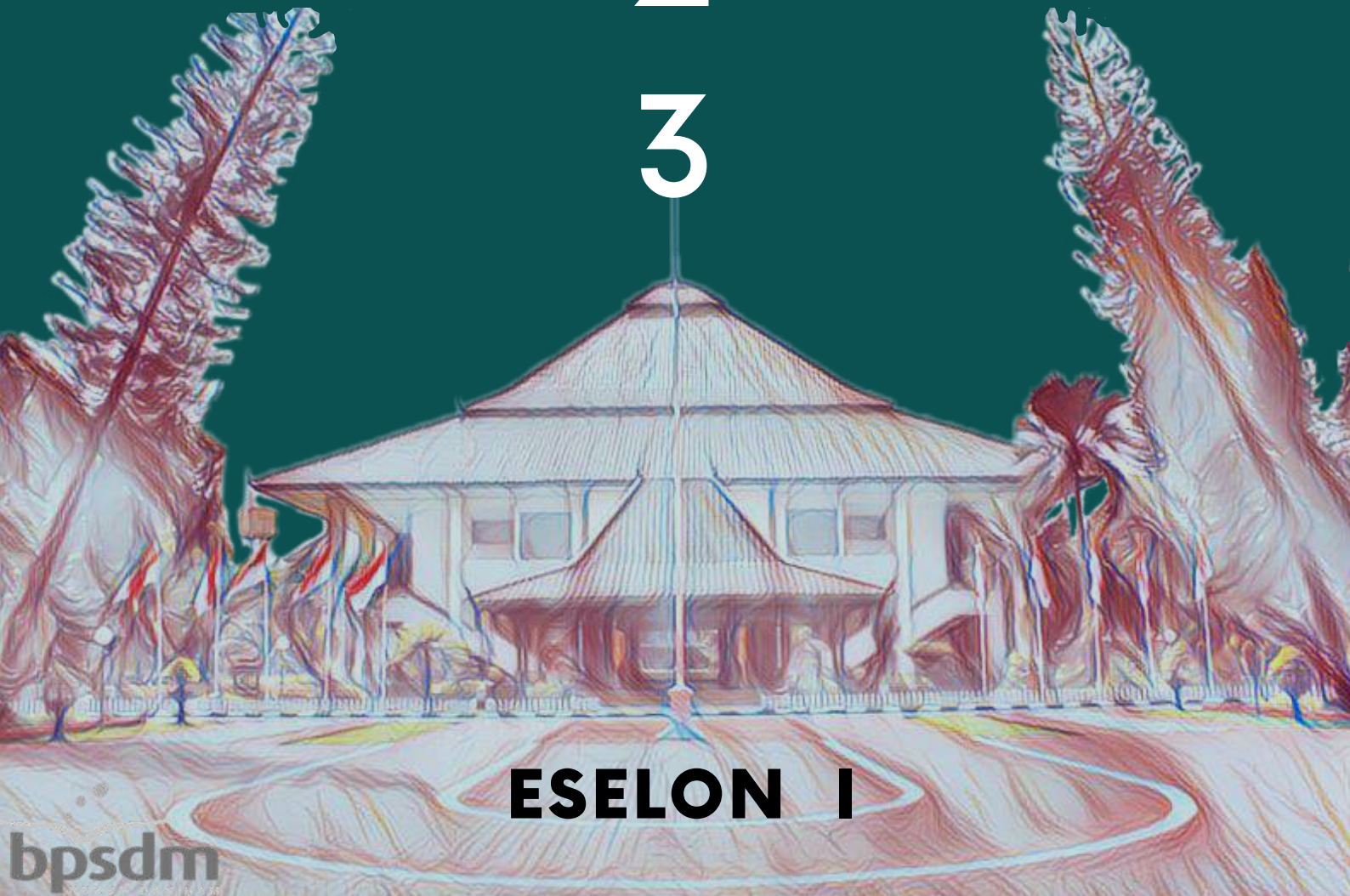

ESELON I

bpsdm

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 19 Februari 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Iwan Kurniawan
NIP 196406191988111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		II
Pernyataan Tanggung Jawab		III
Ringkasan		IV
I.	Laporan Realisasi Anggaran	1
II.	Neraca	2
III.	Laporan Operasional	3
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	4
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	5
	A. Penjelasan Umum	5
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	29
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI.	Lampiran dan Daftar	

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
JALAN RAYA GANDUL NO.4 CINERE DEPOK
TELEPON 021-7543708, FAXIMILE 021-7543709

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 19 Februari 2024
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Iwan Kurniawan
NIP 196406191988111001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.623.417.433,00 dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.078.539.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp298.183.938.444,00 atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp305.611.935.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp1.500.343.264.576,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp399.048.889,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.486.840.351.998,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp13.103.863.689,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp5.447.753.919,00 dan Rp1.494.895.510.657,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.112.396.477,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp268.549.140.337,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp267.436.743.860,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp812.473.726,00) dan (Rp268.249.217.586,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp268.249.217.586,00).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.454.096.342.965,00 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp268.249.217.586,00) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp246.013.929.00 dan transaksi antar entitas senilai Rp308.802.371.349,00 kenaikan/penurunan ekuitas Rp40.799.167.692,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.494.895.510.657,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		%	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.078.539.000	1.623.417.433	151	3.152.919.280
JUMLAH PENDAPATAN		**1.078.539.000**	**1.623.417.433**	**151**	**3.152.919.280**
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	34.843.245.000	34.335.411.219	99	33.754.872.381
Belanja Barang	B.4	213.385.164.000	206.691.687.140	97	166.822.922.118
Belanja Modal	B.5	57.383.526.000	57.156.840.085	100	23.412.400.003
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**305.611.935.000**	**298.183.938.444**	**98**	**223.990.194.502**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.5		-
Belanja Dibayar di Muka	C.6	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.7	-	-
Persediaan	C.8	396.948.899	476.702.771
Jumlah Aset Lancar		396.948.899	476.702.771
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.9	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.10	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.12	1.089.000.068.000	1.089.000.068.000
Peralatan dan Mesin	C.13	121.589.324.040	116.512.418.038
Gedung dan Bangunan	C.14	378.370.649.407	353.165.757.229
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.15	12.401.733.397	12.359.677.154
Aset Tetap Lainnya	C.16	3.215.178.792	3.074.558.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.17	26.913.313.622	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.18	(144.649.915.260)	(122.664.142.634)
Jumlah Aset Tetap		1.486.840.351.998	1.451.448.336.784
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.19	3.157.897.433	3.143.147.433
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.20	12.391.866.906	-
Aset Lain-Lain	C.21	8.053.909.538	5.188.629.286
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22	(10.499.810.188)	(5.710.237.777)
Jumlah Aset Lainnya		13.103.863.689	2.621.538.942
JUMLAH ASET		**1.500.341.164.586**	**1.454.546.578.497**
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23	-	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.24	5.386.205.244	349.715.146
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	61.548.675	100.520.386
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		5.447.753.919	450.235.532
JUMLAH KEWAJIBAN		5.447.753.919	450.235.532
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	1.494.895.510.657	1.454.096.342.965
JUMLAH EKUITAS		1.494.895.510.657	1.454.096.342.965
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**1.500.343.264.576**	**1.454.546.578.497**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.112.396.477	1.128.400.247
JUMLAH PENDAPATAN		**1.112.396.477**	**1.128.400.247**
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	34.335.411.219	33.754.872.381
Beban Persediaan	D.3	1.350.986.302	3.096.062.207
Beban Barang dan Jasa	D.4	144.027.919.203	125.093.169.683
Beban Pemeliharaan	D.5	12.543.004.636	15.868.728.321
Beban Perjalanan Dinas	D.6	48.979.938.025	23.321.516.982
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	27.311.880.952	25.588.253.739
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		**268.549.140.337**	**226.722.603.313**
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(267.436.743.860)	(225.594.203.066)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		(1.198.966.902)	197.982.699
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		94.897.664	197.982.699
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		1.293.864.566	-
Surplius/Defisit dari Kegiatan Non operasionalLai		386.493.176	767.395.386
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		386.493.176	767.395.386
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(812.473.726)	965.378.085
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(268.249.217.586)	(224.628.824.981)
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		**(268.249.217.586)**	**(224.628.824.981)**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	1.454.096.342.965	1.444.031.040.202
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(268.249.217.586)	(224.628.824.981)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		246.013.929	(594.800.693)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	-	(1.924.000)
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4		
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	246.013.929	(592.876.693)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	308.802.371.349	235.288.928.437
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		40.799.167.692	10.065.302.763
EKUITAS AKHIR	E.5	**1.494.895.510.657**	**1.454.096.342.965**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat *(faster)*, lebih baik *(better)*, lebih murah *(cheaper)*, dan terbaru *(newer).*

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan HAM, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis subtantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

"Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Sasaran :

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasyarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1
6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
Jumlah			**3**	**3**	-	-	**6**

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
d. Pendapatan Lain-lain

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
  c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  a. Tanah;
  b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	**Masa Manfaat**
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas Pos Laporan Realisasi Anggaran

Selama periode Tahun Anggaran 2023, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2023

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	1.078.539.000	1.078.539.000
Pendapatan Lain-lain		-
Jumlah Pendapatan	**1.078.539.000**	**1.078.539.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	33.116.929.000	34.843.245.000
Belanja Barang	169.889.197.000	213.385.164.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	52.470.076.000	57.383.526.000
Jumlah Belanja	**255.476.202.000**	**305.611.935.000**

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan Rp1.623.417.433,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.623.417.433,00 atau mencapai 151% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.078.539.000,00. Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	91.039.000	254.184.913	279,20
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	987.500.000	906.300.000	91,78
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan	-	4.194.577	-
Pendapatan Denda	-	3.642.940	-
Pendapatan Lain-lain	-	455.095.003	-
Jumlah	**1.078.539.000**	**1.623.417.433**	**150,52**

Realisasi Pendapatan TA 2023 mengalami penurunan sebesar 48,51% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022. Hal ini disebabkan karena pedapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu TA. 2023 lebih rendah dari TA.2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	254.184.913	378.109.671	(32,77)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	906.300.000	596.600.000	51,91
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	4.194.577	-	100
Pendapatan Denda	3.642.940	376.395.450	(99,03)
Pendapatan Lain-lain	455.095.003	1.801.814.159	(74,74)
Jumlah	**1.623.417.433**	**3.152.919.280**	**(48,51)**

Rincian Realisasi Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha (4251) sebesar Rp254.184.913,00.
   - Terdapat realisasi akun (425129) Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp94.897.664,00 yaitu berupa:
     a. Satker BPSDM sebesar Rp93.577.664,00 berupa lelang 1 paket *scrab*, 4 sepeda motor, 1 paket bekas bongkaran rumah dinas.
     b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp1.320.000,00 atas hasil penjualan/lelang BMN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

berupa Aset Tetap yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

- Terdapat realisasi akun (425131) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp159.287.249,00 yaitu berupa:
  a. Satker BPSDM sebesar Rp158.764.677,00 atas sewa Auditorium, sewa Kamar Flat, sewa Kamar Asrama, sewa Ruangan Kantin.
  b. Satker Poltekim sebesar Rp522.572,00 Pendapatan atas sewa rumah dinas untuk Direktur Politeknik Imigrasi.

2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254) terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa akun 425421 sebesar Rp906.300.000,00 merupakan PNBP Pelatihan Jabatan Fungsional Penyusunan dan Perancang Perundang-Undangan.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan (4257) pada satker Poltekip berupa realisasi akun (425765) Pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp4.194.577,00 yang merupakan penutupan rekening penampungan Tunjangan Ikatan Dinas Taruna.
4. Pendapatan Denda (4258) berupa realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp3.642.940,00 terdapat pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp892.940,00 merupakan potongan SPM atas pembayaran belanja barang pengadaan seragam pakaian dinas pegawai.
   - Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp2.750.000,00 merupakan pendapatan denda atas keterlambatan PT Trikarsa Utama Lestari pengerjaan pembangunan tahun 2021.
5. Pendapatan Lain-Lain (4259) sebesar Rp455.095.003,00 terdiri dari :
   - Terdapat realisasi akun (425911) Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.864.676,00 yang terdiri dari :
     a. Satker BPSDM sebesar Rp556.320,00 berupa pengembalian tunjangan umum karena pegawai tersebut

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

menduduki jabatan fungsional a.n. Adnan, dan pengembalian pembulatan gaji pegawai oleh beberapa pegawai karena efek dari proses pembayaran kekurangan gaji.

b. Satker Poltekip sebesar Rp752,00 berupa pembulatan gaji.

c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp186.804,00. Sebesar Rp 747.204,00 berupa akumulasi penerimaan kelebihan pembayaran gaji bulan Juni-September a.n Wahyuni Sasto dan sebesar Rp4,00 atas pembulatan gaji a.n Ju Lotje Olga.

- Terdapat realisasi akun (425912) Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp384.628.500,00 pada satker Politeknik Imigrasi yang merupakan sisa kontrak tahun lalu.
- Terdapat realisasi akun (425913) Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp68.601.827,00 yang terdiri dari :

  a. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp24.301.352,00 berupa setoran temuan BPK.

  b. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp14.861.791,34 atas pembangunan Gedung Olahraga dan Jalan Lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hasil temuan audit BPK atas pembangunan gedung olahraga dan jalan lingkungan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebesar Rp29.438.683,31.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Rp298.183.938.444,00

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp298.183.938.444,00 atau 98,47% dari anggaran belanja sebesar Rp305.612.291.000,00 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023

URAIAN	TA 2023		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	34.482.478.000	34.338.345.446	99,58
Belanja Barang	214.121.813.000	209.428.466.444	97,81
Belanja Modal	57.008.000.000	57.176.991.581	100,30
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	**305.612.291.000**	**300.943.803.471**	**98,47**
Pengembalian Belanja		(2.759.865.027)	**-**
Total Belanja	**305.612.291.000**	**298.183.938.444**	**97,57**

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

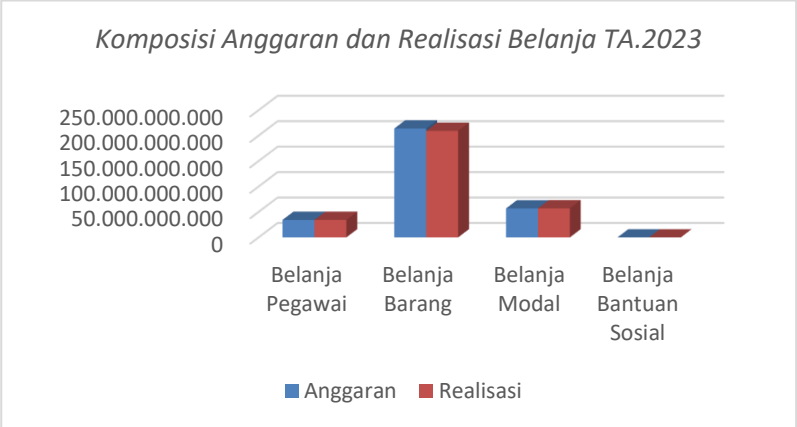

Dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2022, realisasi belanja pada Semester II Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 33,12%.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	34.335.411.219	33.754.872.381	1,72
Belanja Barang	206.691.687.140	166.822.922.118	23,90
Belanja Modal	57.156.840.085	23.412.400.003	144,13
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	**298.183.938.444**	**223.990.194.502**	**33,12**

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp34.335.411.219,00

Realisasi Belanja Pegawai Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.335.411.219,00 dan Rp33.754.872.381,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester II Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,72% dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	32.749.578.446	32.517.174.449	0,71
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	1.588.767.000	1.535.625.000,00	3,46
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**34.338.345.446**	**34.052.799.449**	**0,84**
Pengembalian Belanja Pegawai	(2.934.227)	(297.927.068)	(99,02)
Jumlah Belanja	**34.335.411.219**	**33.754.872.381**	**1,72**

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22.559.031.000	22.524.601.220	-	22.524.601.220	99,85
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	409.000	370.852	4.185	366.667	90,67
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.409.864.000	1.395.918.200	-	1.395.918.200	99,01
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	383.682.000	377.371.882	-	377.371.882	98,36
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	575.150.000	560.120.000	1.080.000	559.040.000	97,39
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.693.082.000	2.679.543.000	-	2.679.543.000	99,50
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	146.855.000	142.472.392	-	142.472.392	97,02
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1.162.197.000	1.151.115.900	-	1.151.115.900	99,05
511129	Belanja Uang Makan PNS	3.450.574.000	3.346.775.000	-	3.346.775.000	96,99
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	598.975.000	571.290.000	1.850.042	569.439.958	95,38
512211	Belanja Uang Lembur	1.863.426.000	1.588.767.000	-	1.588.767.000	85,26
JUMLAH		**34.843.245.000**	**34.338.345.446**	**2.934.227**	**34.335.411.219**	**98,55**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 31 Desember TA 2023 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp2.934.227,00 dengan rincian:

- Satker BPSDM sebesar Rp1.463,00 atas belanja pembulatan gaji PNS.
- Satker Poltekim sebesar Rp1.850,00 atas belanja pembulatan gaji PNS.
- Satker Poltekip sebesar Rp1.480.042,00 atas belanja tunjangan umum PNS.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp598,00 atas pengembalian pembulatan gaji PNS.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp74,00 atas pembulatan gaji pokok PNS.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp206.691.687.140,00

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp206.691.687.140,00 dan Rp166.822.922.118,00.

Realisasi Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 23,90% dari Semester II TA 2022. Hal ini disebabkan terjadinya penambahan anggaran Belanja Barang Semester II Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang
TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	19.746.946.906	18.665.306.052	5,79
Belanja Barang Non Operasional	93.793.917.851	60.707.548.738	54,50
Belanja Persediaan	1.338.663.045	2.379.491.248	(43,74)
Belanja Jasa	30.559.398.649	45.414.021.533	(32,71)
Belanja Pemeliharaan	12.521.256.824	16.585.142.881	(24,50)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	51.468.283.169	23.993.797.594	114,51
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**209.428.466.444**	**167.745.308.046**	**24,85**
Pengembalian Belanja	(2.736.779.304)	(922.385.928)	
Jumlah Belanja	**206.691.687.140**	**166.822.922.118**	**23,90**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
5211	Belanja Barang Operasional	19.962.185.000	19.746.946.906	-	19.746.946.906	98,92
5212	Belanja Barang Non Operasional	94.356.785.000	93.793.917.851	151.059.590	93.642.858.261	99,40
5218	Belanja Barang Persediaan	1.349.009.000	1.338.663.045	-	1.338.663.045	99,23
5221	Belanja Jasa	31.083.110.000	30.559.398.649	92.348.000	30.467.050.649	98,32
5231	Belanja Pemeliharaan	12.659.161.000	12.521.256.824	5.026.570	12.516.230.254	98,91
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	53.974.914.000	51.468.283.169	2.488.345.144	48.979.938.025	95,36
		213.385.164.000	**209.428.466.444**	**2.736.779.304**	**206.691.687.140**	**98,15**

Pada laporan realisasi belanja barang terdapat pengembalian dengan rincian :

a. Pengembalian akun Belanja Barang Non Operasional (5212) sebesar Rp151.059.590,00 terdapat pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp3.113.500,00 terdiri dari pengembalian Belanja Bahan (521211) sebesar Rp2.371.000,00 berupa pengembalian belanja konsumsi rapat dan Pengembalian akun Belanja Honor Output Kegiatan (521213) sebesar Rp742.500,00.
   - Satker Poltekim sebesar Rp147.946.090,00 terdiri dari pengembalian Belanja Bahan (521211) sebesar Rp142.806.090,00 dan Pengembalian akun Belanja Honor Output Kegiatan (521213) sebesar Rp5.140.000,00.

b. Pengembalian akun Belanja Jasa (5221) sebesar Rp92.348.000,00 terdapat pada :
   - Satker BPSDM Hukum dan HAM berupa pengembalian Belanja Jasa Profesi (522151) sebesar Rp43.208.000,00.
   - Satker Poltekim sebesar Rp49.140.000,00 berupa pengembalian Belanja Jasa Profesi (522151).

c. Pengembalian akun Belanja Pemeliharaan (5231) terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp5.026.570,00 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121) berupa pengembalian belanja service AC Split Kelas Politeknik di Tangerang sebesar Rp4.672.770,00 dan pengembalian biaya ongkos kirim pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp353.800,00.

d. Pengembalian akun Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) sebesar Rp2.488.345.144,00 terdapat pada :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp2.486.695.644,00.
- Satker Poltekip sebesar Rp1.649.500,00 merupakan pengembalian Belanja Perjalanan Biasa.

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal Rp57.156.840.085,00

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp57.156.840.085,00 dan Rp23.412.400.003,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal pada Semester II Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar 144,13% dibandingkan Semester II Tahun Anggaran TA 2022 hal ini dikarenakan realisasi belanja modal pembangunan Politeknik Tangerang, Lapangan Tenis Indoor pada Satker BPSDM Hukum dan HAM, dan pembangunan Gedung Serbaguna pada Balai Diklat Sulawesi Utara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.435.942.730	13.138.078.489	(20,57)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.698.351.701	9.361.233.914	398,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	
Belanja Modal Lainnya	42.697.150	913.087.600	(95,32)
Jumlah Belanja Kotor	**57.176.991.581**	**23.412.400.003**	**144,22**
Pengembalian	(20.151.496)	-	-
Jumlah Belanja	**57.156.840.085**	**23.412.400.003**	**144,13**

Rincian Realisasi Belanja Barang Modal per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalia n	Realisasi Neto	%
5311	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.509.856.000	10.435.942.730	-	10.435.942.730	99,30
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.830.670.000	46.698.351.701	(20.151.496)	46.718.503.197	99,72
5361	Belanja Modal Lainnya	43.000.000	42.697.150		42.697.150	99,30
		57.383.526.000	**57.176.991.581**	**-20.151.496**	**57.197.143.077**	**99,68**

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

TA 2023 dan 2022

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	-		
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-		-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**-**	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	**-**	-	-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp10.435.942.730,00

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester II Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp10.435.942.730,00 mengalami penurunan sebesar 20,57% bila dibandingkan dengan Semester II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.138.078.489,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor serta penambahan dan peremajaan peralatan dan mesin yang sudah rusak untuk menunjang kinerja pegawai.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.435.942.730	13.138.078.489	(20,57)
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	**10.435.942.730**	**13.138.078.489**	**(20,57)**
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	**10.435.942.730**	**13.138.078.489**	**(20,57)**

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4.777.389.235,00

Realisasi Belanja Modal Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.777.389.235,00 dan Rp9.361.233.914,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.322.649.642	8.999.335.914	337
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.375.702.059	361.898.000	1.938
Jumlah Belanja Kotor	**46.698.351.701**	**9.361.233.914**	398,85
Pengembalian Belanja Modal	(20.151.496)	-	-
Jumlah Belanja	**46.678.200.205**	**9.361.233.914**	**398,63**

Realisasi Belanja Modal 31 Desember TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 398,42% dikarenakan belanja modal pembangunan Lapangan Tenis Indoor BPSDM Hukum dan HAM, renovasi atas pembangunan Gedung Politeknik, pembangunan pada Badiklat Jateng dan Badiklat Sulut.

Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39.342.499.000	39.322.649.642	-	39.322.649.642	99,95
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7.488.171.000	7.375.702.059	20.151.496	7.355.550.563	98,50
		46.830.670.000	**46.698.351.701**	**20.151.496**	**46.678.200.205**	**99,72**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp42.697.150,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember TA 2023 dan 31 Desember TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp42.697.150,00 dan Rp913.087.600,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya pada 31 Desember TA 2023 mengalami penurunan sebesar 95,32% dibandingkan TA 2022.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik (Turun) %
Belanja *Software*	34.714.000	913.087.600	(96,20)
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	7.983.150	-	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	**42.697.150**	**913.087.600**	**(95,32)**
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja	**42.697.150**	**913.087.600**	**(95,32)**

Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan lain-lain yaitu :

- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.983.150,00 berupa pembelian monografi.
- Satker Balai Diklat Sulut sebesar Rp34.714.000,00 berupa pengembangan aplikasi Sitarsius untuk penyelenggaraan diklat.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial
Rp0,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran

TA 2023 dan 2022

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas dibendahara Pengeluaran (TUP)	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

TA 2023 dan TA 2022

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas
TA 2023 dan 2022

Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang PNBP Rp0,00

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Piutang PNBP
TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Piutang PNBP	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Semester II TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0,00%	-
Jumlah	-	0,00%	-

C.6 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka Rp0,00

Saldo Beban Dibayar di Muka 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Beban dibayar di muka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka
TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pembayaran Internet	-	-
Koreksi nilai aset tetap non revaluasi	-	-
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	-	-
Jumlah	**-**	**-**

C.7 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima
Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima
TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

C.8 Persediaan

Persediaan
Rp396.948.889,00

Nilai Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp396.948.889,00 dan Rp476.702.771,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Persediaan

TA 2023 dan 2022

JENIS	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Barang Konsumsi	387.058.389	396.134.911
Barang untuk Pemeliharaan	5.490.500	76.167.860
Amunisi	4.400.000	4.400.000
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	**396.948.889**	**476.702.771**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.9 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.10 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.12 Tanah

Tanah Rp1.089.000.068.000,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.1.089.000.068.000,00. Aset

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Tetap Tanah terdiri dari :

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m2 terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m^2 terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m^2 yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.089.000.068.000,00 berasal dari

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp687.998.681.000;
- Satker Poltekip sebesar Rp58.851.882.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp16.773.700.000,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp323.737.178.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.638.627.000,00.

C.13 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin

Rp121.589.324.040,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp121.589.324.040,00 dan Rp116.512.418.038,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2023	**Rp**	**116.512.418.038**
Mutasi tambah:		14.124.734.080
Pembelian		10.745.941.315
Reklas masuk		2.443.164.734
Perolehan lainnya		203.938.000
Koreksi Susulan		136.994.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggu		408.187.686
Transfer masuk		145.450.000
Pengembangan Nilai aset		41.058.345
Mutasi kurang:		9.047.828.078
Reklas keluar		1.824.053.959
Koreksi pencatatan		227.994.000
Penghentian aset dari penggunaan		6.969.912.504
Penyusutan		25.867.615
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**121.589.324.040**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	Rp	(83.370.050.046)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Rp**	**38.219.273.994**

Mutasi bertambah sebesar Rp14.124.734.080,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp9.392.273.975,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp962.567.390,00 berupa pembelian;
- Satker Poltekip sebesar Rp163.438.000,00 berupa reklas masuk;
- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp577.908.535,00;
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp741.068.100,00;
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp2.287.478.080,00.

Mutasi kurang sebesar Rp9.047.828.078,00 mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM sebesar Rp4.681.669.608,00 berupa reklasifikasi keluar senilai Rp752.405.944,00; koreksi pencatatan senilai Rp136.994.000,00; penghentian aset dari penggunaan senilai Rp3.792.269.664,00.
- Satker Poltekim sebesar Rp2.489.230.840,00 berupa penghentian penggunaan Mini Bus (Penumpang 14 orang kebawah) serta peralatan dan mesin lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker Poltekip sebesar Rp851.850.000,00 berupa reklasifikasi keluar 47 buah Kursi Zeis senilai Rp163.438.000 dan penghentian aset dari pengunaan berupa 2 unit Micro Bus senilai Rp688.412.000,00.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp28.000.000,00 berupa reklas peralatan.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp5.791.005,00 berupa reklasifikasi keluar Lemari Penyimpan menjadi Nakas.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp991.286.625,00 berupa penyusutan senilai Rp25.867.615,00; reklasifikasi keluar Rp874.419.010,00; dan koreksi senilai Rp91.000.000,00.

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.589.324.040,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp83.693.591.148,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp12.790.365.677,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp9.618.384.444,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp3.965.150.535,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.580.845.811,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp3.940.986.425,00.

C.14 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp378.370.649.407,00

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp378.370.649.407,00 dan Rp353.165.757.229,00.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Saldo per 01 Januari 2023	**353.165.757.229**
Mutasi tambah:	35.246.392.140
Pembelian	98.679.000
Reklas masuk	9.773.790.487
Pengembangan melalui KDP	12.148.994.123
Koreksi pencatatan nilai bertambah	125.508.500
Transfer masuk	12.913.044.535
Pengembangan nilai aset	186.375.495
Mutasi kurang:	10.041.499.962
Reklasifikasi Keluar	9.773.790.487
Koreksi susulan	59.030.475
Koreksi catat	208.679.000
Saldo per 31 Desember 2023	**378.370.649.407**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(52.693.707.159)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**325.676.942.248**

Terdapat nilai Mutasi Tambah sebesar Rp35.246.392.140,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp15.665.248.800,00 berupa pembelian senilai Rp98.679.000,00; reklasifikasi masuk senilai Rp9.773.790.487,00; Pengembangan melalui KDP senilai Rp5.667.270.813,00; koreksi pencatatan nilai bertambah Rp125.508.500,00.
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp12.913.044.535,00 berupa transfer masuk Gedung dan Bangunan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ke Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
- Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp5.165.194.550,00 merupakan pembangunan dengan KDP senilai Rp4.978.819.055,00 dan pengembangan nilai aset berupa pekerjaan penataan ruang *podcast* senilai Rp186.375.495,00.
- Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.502.904.255,00 berupa pengembangan melalui KDP berupa renovasi bangunan gedung kantor permanen.

Terdapat Nilai Mutasi Kurang Rp10.041.499.962,00 terdiri dari:

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp9.872.469.487,00 berupa Reklasifikasi Keluar sebesar Rp9.773.790.487,00 dan Koreksi Pencatatan sebesar Rp Rp98.679.000,00.
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp44.300.475,00 koreksi susulan (berkurang) pada Gedung dikarenakan adanya temuan hasil audit inspektorat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp124.730.000,00 merupakan koreksi susulan atas Temuan BPK TA 2022 atas Kekurangan Volume Pengerjaan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp7.543.969,00 dan Koreksi Temuan ITJEN TA 2021 senilai Rp52.428.008,00 atas Kelebihan Bayar Pembangunan Gedung Pendidikan Permanen. Juga terhadap Temuan Inspektorat Jenderal TA 2021 atas Kelebihan Bayar pada pekerjaan Pembangunan Asrama Permanen dengan nilai Rp57.571.992,00 dan Koreksi Susulan terhadap Temuan BPK TA 2022 atas Kekurangan Volume Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Asrama Permanen dengan nilai Rp7.186.031,00.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp378.370.649.407,00 terdiri dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp299.630.868.046,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp5.140.133.032,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp12.913.044.535,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp48.557.341.490,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp12.129.262.304,00.

C.15 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp12.401.733.397,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.401.733.397,00 dan Rp12.359.677.154,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	**12.359.677.154**
Mutasi tambah:	42.056.243
Perolehan Lainnya	42.056.243
Mutasi kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Saldo per 31 Desember 2023	**12.401.733.397**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(7.035.908.055)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**5.365.825.342**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Mutasi tambah sebesar Rp42.056.243,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM merupakan penambahan berupa jembatan penyeberangan menggunakan metode Perolehan Lainnya.

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.401.733.397,00 berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM.

C.16 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya

Rp3.215.178.792,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp3.215.178.792,00 dan Rp3.074.558.997,00.

Saldo per 01 Januari 2023	**3.074.558.997**
Mutasi tambah:	37.671.650
Pembelian	24.921.650
Reklas Masuk	12.750.000
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
Saldo per 31 Desember 2023	**3.112.230.647**
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2023	(1.550.250.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**1.561.980.647**

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan.

Mutasi tambah sebesar Rp140.619.795,00 terdapat pada

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp99.922.645,00 berupa pembelian monografi.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa tengah sebesar Rp7.983.150,00 berupa pembelian 70 monografi Perpustakaan Pojok Pintar.
- Satker Poltekim sebesar Rp12.750.000,00 berupa reklasifikasi masuk Alat Musik Modern/Band.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp19.964.000,00 berupa pembelian 171 monografi.

Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.215.178.792,00 berasal dari :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.450.949.267,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp868.538.800,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp867.743.575,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp7.983.150,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp19.964.000,00.

C.17 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp26.913.313.622,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp26.913.313.622,00 dan Rp0,00. Konstruksi dalam pengerjaan merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca, terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM berupa pembangunan Gedung Rektorat kampus politeknik di Tangerang yang pembangunannya melewati periode 2023 karena masih diberikan masa penyelesaian pekerjaan selama 50 hari kerja yang jatuh tempo pada tanggal 19 Februrari 2024.

C.18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Rp144.649.915.260,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp144.649.915.260,00 dan Rp122.664.142.634,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	121.589.324.040	83.370.050.046	38.219.273.994
2	Gedung dan Bangunan	378.370.649.407	52.693.707.159	325.676.942.248
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.401.733.397	7.035.908.055	5.365.825.342
4	Aset Tetap Lainnya	3.215.178.792	1.550.250.000	1.664.928.792
Total		**515.576.885.636**	**144.649.915.260**	**370.926.970.376**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.19 Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp3.157.897.433,00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.157.897.433,00 dan Rp3.143.147.433,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Nilai	
1	Software Komputer	Rp	3.157.897.433
2	ATB Lainnya	Rp	-
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2023		**Rp**	**3.157.897.433**

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	**Rp**	**3.143.147.433**
Mutasi tambah:	Rp	14.750.000
Pengembangan Apk	Rp	14.750.000
Pembelian	Rp	-
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Reklasifikasi keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	**Rp**	**3.157.897.433**
Amortisasi s.d 31 Desember 2023	Rp	(2.449.493.562)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**Rp**	**708.403.871**

Mutasi tambah sebesar Rp14.750.000,00 terdapat pada Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp14.750.000,00 berupa pengembangan Aplikasi Sitarsius untuk penyelenggara diklat.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.157.897.433,00 berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp1.476.732.100,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp652.865.033,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp774.458.000,00;
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp69.042.300,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp140.750.000,00;
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp44.050.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.20 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Rp12.391.866.906,00

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar Rp12.391.866.906,00 terdapat pada satker BPSDM Hukum dan HAM. Dana yang dibatasi penggunaannya dari RPATA Pekerjaan yang selesai per 31 Desember 2023 terdiri dari :

1. Pengadaan Langganan Akses Internet Politeknik Tangerang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan INDONESIA COMNETS PLUS sebesar Rp747.665.400,00.
2. Pengadaan Langganan Akses Internet BPSDM pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan INDONESIA COMNETS PLUS sebesar Rp1.075.026.000,00;
3. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan Renovasi Lapangan Tenis Indoor dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan DANUREKSA SARANA CIPTA sebesar Rp 97.648.550,00;
4. Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Perencana (Pengawasan Berkala) Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM - Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dengan BAGUS DARAJAT KONSULTAN sebesar Rp245.176.702,00;
5. Paket Pekerjaan Konstruksi Konsolidasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor untuk Kegiatan Layanan Prasarana Internal pada BPSDM Hukum dan HAM TA 2023 dengan VIASTA SENTRAL PRIMA sebesar Rp1.288.096.004,00.

Dana yang dibatasi penggunaannya berasal dari RPATA yang penyelesaian pekerjaan pembangunannya melewati periode pelaporan 2023 dengan BAST 77,14% pada 31 Desember 2023 terdiri dari :

1. Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2023 dengan FREYA KARYA UTAMA sebesar Rp430.740.750,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

2. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Rektorat Akademik BPSDM Hukum dan HAM-Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 dengan GELORA MEGAH SEJAHTERA sebesar Rp8.507.513.500,00;

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp8.053.909.538,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp8.053.909.538,00 dan Rp5.188.629.286,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
TA 2023 dan 2022

Jenis Aset	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah	8.053.909.538	5.188.629.286
Jumlah Belanja	**8.053.909.538**	**5.188.629.286**

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2023	**5.188.629.286**
Mutasi tambah:	5.729.296.654
Reklasifikasi	5.729.296.654
Mutasi kurang:	2.864.666.402
Penghapusan	635.703.216
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentika	408.187.686
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	1.679.916.500
Lelang	140.859.000
Saldo per 31 Desember 2023	**8.053.259.538**
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	(8.050.316.626)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	**2.942.912**

Mutasi tambah aset lain-lain sebesar Rp5.729.296.654,00 terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp3.792.269.664,00 berupa Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa peralatan dan mesin.
- Satker Poltekim sebesar Rp1.248.614.990,00 berupa reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain.
- Satker Poltekip sebesar Rp688.412.000,00 berupa reklas aset tetap ke aset lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Mutasi kurang aset lain-lain sebesar Rp2.864.666.402,00 terdiri atas:

- Satker BPSDM sebesar Rp2.723.807.402,00 berupa
  a. penghapusan Peralatan dan Mesin senilai Rp103.838.000,00 dan penghapusan Gedung dan Bangunan senilai Rp531.865.216,00;
  b. Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif sebesar Rp408.187.686,00;
  c. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan sebesar Rp1.679.916.500,00.
- Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp140.859.000,00 berupa atas penjualan / lelang Barang yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi.

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.053.909.538,00, berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp4.793.024.664,00;
- Satker Poltekim sebesar Rp1.636.583.236,00;
- Satker Poltekip sebesar Rp1.585.196.512,00;
- Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp39.105.126,00;

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp10.499.810.188 ,00

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.499.810.188,00 dan Rp5.710.237.777,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	*Software* Komputer	3.157.897.433	2.449.493.562	708.403.871
2	ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah		**3.157.897.433**	**2.449.493.562**	**708.403.871**
B	Aset Lainnya	8.053.909.538	8.050.316.626	3.592.912
Jumlah		**8.053.909.538**	**8.050.316.626**	**3.592.912**
Total		**11.211.806.971**	**10.499.810.188**	**711.996.783**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN
Rp0,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp5.386.205.244,00

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp5.386.205.244,00 dan Rp349.715.146,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar danakan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar berupa belanja listrik, belanja air dan belanja telepon bulan Desember 2022 yang tagihannya diterima pada Januari 2023.
Adapun rincian Utang Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	423.855.303
2	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.962.349.941
Total		**Rp 5.386.205.244**

1. Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212113) sebesar Rp423.855.303,00 pada :
   - Satker BPSDM Rp384.101.316,00 merupakan belanja daya jasa listrik, telepon, dan air pemakaian Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024.
   - Satker Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp6.413.987,00 merupakan belanja daya jasa listrik dan air pemakaian Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024.
   - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp25.690.415,00 merupakan belanja daya jasa telepon dan internet pemakaian Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp7.649.585,00 merupakan belanja daya jasa telepon dan internet pemakaian Desember 2023 yang dibayar di Januari 2024.

2. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp4.962.349.941,00 merupakan
   a. BAST RPATA 100% dan sudah dilakukan Jurnal Penyesuaian ke Utang Pihak Ketiga Lainnya, yaitu :
      1) BAST konsultan perencanaan pembangunan gedung rektorat di Tangerang;
      2) BAST kontrak langganan akses internet BPSDM;
      3) BAST kontrak langganan akses internet Poltekip dan Poltekim;
      4) Konsultan Pengawas Pembangunan Lapangan Tennis Indoor BPSDM;
      5) Konstruksi Lapangan Tennis Indoor BPSDM.
   b. BAST RPATA 77,14% dan sudah dilakukan Jurnal Penyesuaian ke Utang Pihak Ketiga Lainnya, yaitu :
      1) Kontrak kontruksi Gedung Rektorat di Tangerang
      2) Kontrak pengawas konstruksi Gedung Rektorat di Tangerang.

C.25 Utang yang Belum Diterima Tagihannya

Utang yang Belum Diterima Tagihannya
Rp0,00

Utang yang Belum Diterima Tagihannya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.26 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayarkan kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

C.27 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka
Rp0,00

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar dan Rp61.548.675,00 dan Rp100.520.386,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP.

C.28 Ekuitas

Ekuitas
Rp1.494.895.510.657,00

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.895.510.657,00 dan Rp1.454.096.342.965,00.

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp1.112.396.477,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.112.396.477,00 dan Rp1.128.400.247,00 Pendapatan tersebut terdiri dari :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
TA 2023 dan 2022

AKUN	URAIAN	TA 2023	TA 2022
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	198.258.960	155.404.797
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	906.300.000	596.600.000
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	4.194.577	-
425811	Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.642.940	376.395.450
Jumlah	**Jumlah**	**1.112.396.477**	**1.128.400.247**

Rincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain:

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp198.258.960,00 terdapat pada:
  a. Satker BPSDM sebesar Rp177.747.341,00;
  b. Satker Poltekim sebesar Rp522.572,00;
  c. Satker Balai Diklat Hukum dan HAM Kepulauan Riau sebesar Rp19.989.047,00.
- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421) pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp906.300.000,00.
- Pendapatan dari Penutupan Rekening (425765) pada satker Poltekip sebesar Rp4.194.577,00 merupakan sisa saldo yang dikembalikan ke negara dari penutupan rekening penampungan Tunjangan Ikatan Dinas Taruna.
- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (425811) sebesar Rp3.642.940,00 terdapat pada :
  a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp892.940,00 merupakan potongan SPM atas pembayaran belanja barang; dan
  b. Satker Badiklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp2.750.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp34.335.411.219,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.335.411.219,00 dan Rp33.754.872.381,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2023	TA 2022
Beban Gaji Pokok PNS	22.524.601.220	21.934.681.216
Beban Pembulatan Gaji PNS	370.852	344.151
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-4.185	-3.688
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1.395.918.200	1.385.518.914
Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	-1.170.450
Beban Tunj. Anak PNS	377.371.882	365.551.766
Beban Tunj. Struktural PNS	560.120.000	887.115.000
Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	-1.080.000	-287.100.120
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.679.543.000	2.502.230.000
Pengembalian Beban Tunj. Fungsional PNS	0	-185.050
Beban Tunj. PPh PNS	142.472.392	149.766.042
Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	-217.260
Beban Tunj. Beras PNS	1.151.115.900	1.130.331.360
Beban Uang Makan PNS	3.346.775.000	3.579.876.000
Beban Tunjangan Umum PNS	571.290.000	581.760.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-1.850.042	-9.250.500
Beban Uang Lembur	1.588.767.000	1.535.625.000
Jumlah	**34.335.411.219**	**33.754.872.381**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp1.350.986.302,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.350.986.302,00 dan Rp3.096.062.207,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan

TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.350.986.302	3.056.462.207	(55,80)
Beban Persediaan bahan baku	-	-	-
Beban Persediaan Amunisi	-	39.600.000	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	**1.350.986.302**	**3.096.062.207**	**(56,36)**

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa
Rp144.027.919.203,00

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp144.027.919.203,00 dan Rp125.093.169.683,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa

TA 2023 dan 2022

URAIAN	TA 2023	TA 2022	% Naik (TURUN)
Beban Keperluan Perkantoran	17.564.684.338	13.946.536.418	26
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5.630.910	4.902.310	15
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.061.380.000	1.238.320.000	(14)
Beban Barang Operasional Lainnya	1.090.070.658	1.303.464.734	(16)
Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Pengembalian Beban Barang-Penanganan Pandemi Covid19	-	(4.200.000)	(100)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.787.000	2.172.082.590	(100)
Pengembalian Beban Bahan	(145.177.090)	(1.348.000)	10.670
Beban Bahan	34.868.400.009	17.646.975.659	98
Beban Honor Output Kegiatan	1.428.650.000	2.071.980.000	(31)
Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	(5.882.500)	(18.483.000)	(68)
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-	(7.650.000)	(100)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	57.013.366.746	36.484.575.526	56
Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan	-	(7.128.600)	(100)
Beban Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	77.099.051	4.474.017.553	(98)
Beban Langganan Listrik	4.979.081.499	3.618.644.865	38
Beban Langganan Telepon	16.728.246	16.530.860	1
Beban Langganan Air	190.699.900	8.174.750	2.233
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4.876.582.738	4.805.490.937	1
Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	-	(129.297.451)	(100)
Beban Jasa Konsultan	-	69.870.000	(100)
Beban Sewa	6.885.398.320	6.099.316.919	13
Pengembalian Beban Sewa	-	(26.643.613)	(100)
Pengembalian Beban Jasa Profesi	(92.348.000)	(52.702.652)	75
Beban Jasa Profesi	13.282.057.742	27.447.499.990	(52)
Beban Jasa Lainnya	398.019.361	750.150.000	(47)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4.971.000	2.948.058.358	(100)
Pengembalian Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid19	-	(2.652.000)	(100)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	421.796.630	30.000.000	1.306
Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99.922.645	-	100
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	-	206.683.530	(100)
Jumlah	**144.027.919.203**	**125.093.169.683**	15

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp12.543.004.636,00

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.543.004.636,00 dan Rp15.868.728.321,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan

TA 2023 dan 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.577.342.401	11.826.954.247	(27)
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangun	100.633.385	-	100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	344.810.639	-	100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.520.218.211	3.362.498.298	4
Jumlah	**12.543.004.636**	**15.189.452.545**	**(17)**

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas

Rp48.979.938.025,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp48.979.938.025,00 dan Rp23.321.516.982,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas

TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Perjalanan Biasa	43.311.823.423	17.459.684.304	148,07
Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	-2.386.641.935	-586.182.629	307,15
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	273.680.000	1.077.669.286	-74,60
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Ko	-4.050.000	-12.900.000	-68,60
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.882.779.746	5.326.082.004	48,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-97.653.209	-70.397.983	38,72
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	130.362.000	-100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-2.800.000	-100,00
Jumlah	**48.979.938.025**	**23.321.516.982**	**110,02**

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0,00

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial
Rp0,00

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp.0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp27.311.880.952,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.311.880.952,00 dan Rp25.588.253.739,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.780.607.974	14.506.183.563	8,8
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.857.485.460	9.257.207.066	6,5
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1.007.540.992	1.147.669.952	(12,2)
Beban Penyusutan Irigasi	19.808.858	19.808.858	-
Beban Penyusutan Jaringan	10.156.250	10.156.250	-
Beban Amortisasi Software	586.245.141	558.299.623	5,0
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak	50.036.277	88.928.427	(43,7)
Jumlah	**27.311.880.952**	**25.588.253.739**	**6,7**

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.11 BEBAN LAIN-LAIN

Beban Lain-lain Rp0,00

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus dari Kegiatan Non Operasional (Rp812.473.726,00)

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar (Rp812.473.726,00) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	Realisasi 2023	Realisasi 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94.897.664	197.982.699	-52,07
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1.293.864.566	-	100,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	386.493.176	767.395.386	-49,64
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	-	-	0,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-812.473.726**	**965.378.085**	**184,16**

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Realisasi Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang diperoleh sebesar Rp386.493.176,00 terdapat pada :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

a. Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp556.320,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) atas pengembalian tunjangan umum dan tunjangan pembulatan karena ada pegawai yang menduduki jabatan fungsional.
b. Satker Poltekim sebesar Rp384.628.500,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) berupa pengembalian sisa kontrak belanja bahan konsumsi Taruna Politeknik Imigrasi.
c. Satker Poltekip sebesar Rp752,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) berupa pengembalian pembulatan gaji PNS.
d. Satker Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp1.307.604,00 merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) atas penerimaan kelebihan pembayaran gaji a.n Wahyuni Sasto dan pembulatan gaji a.n Ju Lotje Olga.

D.13 POS-POS LUAR BIASA

Pos-Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp1.454.096.342.965,00,00

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.454.096.342.965,00 dan Rp1.444.031.040.202,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO
(Rp268.249.217.586,00)

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar (Rp268.249.217.586,00) dan (Rp224.628.824.981,00). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar
Rp0,00

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset

Koreksi Reklasifikasi Aset
Rp0,00

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok asset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar dan Rp1.924.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi
Rp246.013.929,00

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp246.013.929,00 dan (Rp592.876.693,00). Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan penyusutan transaksional atas koreksi nilai bertambah jalan khusus komplek, dengan rincian sebagai berikut:

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp308.802.371.349,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp308.802.371.349,00 dan Rp235.288.928.437,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.623.417.433)
Ditagihkan ke Entitas Lain	298.183.938.444
Transfer Masuk	12.241.850.338
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	**308.802.371.349**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL (Rp1.623.417.433,00)/ Rp298.183.938.444,00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp1.623.417.433,00) sedangkan DKEL sebesar Rp298.183.938.444,00.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar Rp12.241.850.338,00/ Rp0,00

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp12.241.850.338,00 sedangkan Transfer Keluar sebesar Rp0,00.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp.0,00

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,00.

E.5 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp1.494.895.510.657,00

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.494.895.510.657,00 dan Rp1.454.096.342.965,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Terdapat ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp304.119.300,00. Ketidaksesuain kode akun dikarenakan tidak terdapat anggaran belanja yang sesuai pada RKAKL untuk menampung realisasi belanja dan tidak dapat dilakukan koreksi SPM atas akun belanja tersebut.
   a. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp304.119.300,00 terdiri dari :
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.376.400,00 atas pembelian Oksimeter Omron.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.798.200,00 atas pembelian Termometer Infrared Yuwel.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.642.800,00 atas pembelian Kursi Lipat portabel Folding Chair Soleil.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp2.830.500,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Easytouch.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp3.552.000,00 atas pembelian Alat cek kadar gula darah, kolesterol, hemoglobin, dan asam urat Accupro.
      - Belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel (521252) sebesar Rp29.250.000,00 atas pembelian *Ear Phone*. Ketidaksesuaian kode akun disebabkan anggaran yang tersedia untuk belanja barang tersebut merupakan jenis belanja ekstrakomptabel namun nilai realisasi belanja melebihi nilai kapitalisasi dan tidak dapat dicatat sebagai intrakomptabel.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp261.849.000,00 atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor.
      - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp1.820.400,00 atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lapangan Tenis dan Perlengkapan Lapangan Tenis Indoor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

b. Ketidaksesuaian Kode Akun vs Kode BMN pada Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara sebesar Rp58.741.930,00 terdiri dari :
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp646.575,00 atas pembelian kursi besi.
   - Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111) sebesar Rp921.665,00 atas pembelian tabung pemadam api.

2. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini telah selesai dilaksanakan pembongkaran bangunan eksisting (rumah negara) yang akan dijadikan objek pembangunan bangunan pengganti berupa Rumah Negara dengan rincian :
   a. Rumah Negara Tipe A sebanyak 1 unit
   b. Rumah Negara Tipe B sebanyak 7 unit
   c. Rumah Negara Tipe C sebanyak 9 unit
   d. Flat seluas 471 meter persegi.
   e. Pembangunan sarana dan prasarana lingkungan seluas 2.385 meter persegi.
3. BPSDM Hukum dan HAM sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum dan HAM yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
4. Aset tanah pada BPSDM Hukum dan HAM yang Sertifikatnya belum Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan HAM dan belum diungkap dalam CaLBMN dan sudah dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.
5. Terdapat Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin yang diklasifikasikan ke kelompok jenis barang yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM namun belum seluruhnya dilakukan reklasifikasi, antara lain berupa:
   a. Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika (30803)
   b. Peralatan Laboratorium Hydrodinamica (30807)
   c. Alat Khusus Kepolisian (30904);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Atas hal tersebut sedang melakukan inventarisasi ulang terkait jenis barang dan akan dilakukan reklasifikasi pada semester I tahun 2024.

F.2 PENGUNGKAPAN ANGGARAN BELANJA COVID-19

I. Dampak Pandemik Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
   a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
   b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
   c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
   d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2021.

II. Terdapat realisasi belanja anggaran Penanganan Pandemi Covid-19 yang terdiri dari :
   - Realisasi Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) sebesar Rp6.787.000,00 pada satker Badiklat Sulawesi Utara.
   - Realisasi Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521241) sebesar Rp77.099.051,00 terdapat pada
     a. Satker satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp42.228.900,00;
     b. Satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp23.154.151,00;
     c. Satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp11.716.000,00.
   - Realisasi Belanja Barang Persediaan- Penanganan Pandemi Covid-19 (521841) sebesar Rp991.500,00 pada satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp494.000,00 dan satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp497.500,00 .
   - Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 (522192) sebesar Rp4.971.000,00 pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp325.000,00 dan satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp4.646.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	399,048,889	476,702,771	(77,653,882)	(16.29)
JUMLAH ASET LANCAR	**399,048,889**	**476,702,771**	**(77,653,882)**	**(16.29)**
ASET TETAP				
Tanah	1,089,000,068,000	1,089,000,068,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	121,589,324,040	116,512,418,038	5,076,906,002	4.36
Gedung dan Bangunan	378,370,649,407	353,165,757,229	25,204,892,178	7.14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	12,401,733,397	12,359,677,154	42,056,243	0.34
Aset Tetap Lainnya	3,215,178,792	3,074,558,997	140,619,795	4.57
Konstruksi Dalam Pengerjaan	26,913,313,622	0	26,913,313,622	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(144,649,915,260)	(122,664,142,634)	(21,985,772,626)	17.92
JUMLAH ASET TETAP	**1,486,840,351,998**	**1,451,448,336,784**	**35,392,015,214**	**2.44**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	3,157,897,433	3,143,147,433	14,750,000	0.47
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	12,391,866,906	0	12,391,866,906	0.00
Aset Lain-lain	8,053,909,538	5,188,629,286	2,865,280,252	55.22
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(10,499,810,188)	(5,710,237,777)	(4,789,572,411)	83.88
JUMLAH ASET LAINNYA	**13,103,863,689**	**2,621,538,942**	**10,482,324,747**	**399.85**
JUMLAH ASET	**1,500,343,264,576**	**1,454,546,578,497**	**45,796,686,079**	**3.15**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	5,386,205,244	349,715,146	5,036,490,098	1,440.17
Pendapatan Diterima Dimuka	61,548,675	100,520,386	(38,971,711)	(38.77)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5,447,753,919**	**450,235,532**	**4,997,518,387**	**1,109.98**
JUMLAH KEWAJIBAN	**5,447,753,919**	**450,235,532**	**4,997,518,387**	**1,109.98**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,494,895,510,657	1,454,096,342,965	40,799,167,692	2.81
JUMLAH EKUITAS	**1,494,895,510,657**	**1,454,096,342,965**	**40,799,167,692**	**2.81**
JUMLAH EKUITAS	**1,494,895,510,657**	**1,454,096,342,965**	**40,799,167,692**	**2.81**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**1,500,343,264,576**	**1,454,546,578,497**	**45,796,686,079**	**3.15**

NERACA

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_neraca_percobaan_kas_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	298,183,938,444
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,623,417,433	0
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	159,287,249
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,642,940
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,864,676
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,601,827
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	22,524,601,220	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	370,852	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,395,918,200	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	377,371,882	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	560,120,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,679,543,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	142,472,392	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,151,115,900	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,346,775,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	571,290,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	1,588,767,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,583,078,338	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,630,910	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,061,380,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,090,070,658	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,787,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	34,868,400,009	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,428,650,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,013,366,746	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	77,099,051	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	306,479,400	0
3.0	521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99,922,645	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,113,099,234	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	224,572,311	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	991,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,915,783,369	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	15,998,869	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522113	Belanja Langganan Air	174,849,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,882,320,988	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,885,398,320	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	13,282,057,742	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	398,019,361	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,971,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,577,342,401	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,802,760	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	386,866,882	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,525,244,781	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	43,311,823,423	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	273,680,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,882,779,746	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10,435,942,730	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,322,649,642	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	7,375,702,059	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	42,697,150	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	4,185
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	1,080,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,850,042
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	145,177,090
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	5,882,500
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	92,348,000
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	5,026,570
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	2,386,641,935
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	4,050,000
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	97,653,209
3.1	533121	Pengembalian Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	20,151,496
JUMLAH			**302,567,220,904**	**302,567,220,904**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	389,158,389	0
0.0	117112	Amunisi	4,400,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	5,490,500	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	121,589,324,040	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	378,370,649,407	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,390,995,097	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,215,178,792	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	26,913,313,622	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	83,370,050,046
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	52,693,707,159
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	6,021,131,053
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	128,757,577
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	886,019,425
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,550,250,000
0.0	162151	Software	3,157,897,433	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	12,391,866,906	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	8,053,909,538	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	8,050,316,626
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	2,449,493,562
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	423,855,303
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	4,962,349,941
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	61,548,675
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	298,183,938,444
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,623,417,433	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	12,241,850,338
0.0	391111	Ekuitas	0	1,454,096,342,965
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	246,013,929
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	198,258,960
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	906,300,000
3.0	425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,642,940
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,864,676
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	22,524,601,220	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	366,667	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,395,918,200	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	377,371,882	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	559,040,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	2,679,543,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	142,472,392	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	1,151,115,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,346,775,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	569,439,958	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	1,588,767,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,564,684,338	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,630,910	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,061,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,090,070,658	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6,787,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	34,723,222,919	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,422,767,500	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	57,013,366,746	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	77,099,051	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	421,796,630	0
3.0	521254	Beban Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	99,922,645	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,979,081,499	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	16,728,246	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	190,699,900	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,876,582,738	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,885,398,320	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	13,189,709,742	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	398,019,361	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	4,971,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,577,342,401	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	344,810,639	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,520,218,211	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	40,925,181,488	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	269,630,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,785,126,537	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	15,780,607,974	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,857,485,460	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:22 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,007,540,992	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,808,858	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	10,156,250	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	586,245,141	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	50,036,277	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,350,986,302	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	100,633,385	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	1,293,864,566	0
JUMLAH			**1,926,959,412,360**	**1,926,959,412,360**

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 19/02/2024

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	396,134,911	0
0.0	117112	Amunisi	4,400,000	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,167,860	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	116,512,418,038	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	353,165,757,229	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	10,348,938,854	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	3,074,558,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	73,255,577,125
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	41,872,663,554
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	5,013,590,061
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	108,948,719
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	875,863,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	162151	Software	3,143,147,433	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	5,188,629,286	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	3,846,989,356
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,863,248,421
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	349,715,146
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	100,520,386
0.0	391111	Ekuitas	0	1,454,096,342,965
JUMLAH			**1,582,920,958,908**	**1,582,920,958,908**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:21 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_es1_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	**1,078,539,000**	**1,623,417,433**	**544,878,433**	**151**	**1,047,500,000**	**3,152,919,280**	**2,105,419,280**	**301**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,078,539,000	1,623,417,433	544,878,433	151	1,047,500,000	3,152,919,280	2,105,419,280	301
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**1,078,539,000**	**1,623,417,433**	**544,878,433**	**151**	**1,047,500,000**	**3,152,919,280**	**2,105,419,280**	**301**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	305,611,935,000	298,183,938,444	(7,427,996,556)	98	229,437,166,000	223,990,194,502	(5,446,971,498)	98
1. Belanja Pegawai	34,843,245,000	34,335,411,219	(507,833,781)	99	34,211,419,000	33,754,872,381	(456,546,619)	99
2. Belanja Barang	213,385,164,000	206,691,687,140	(6,693,476,860)	97	171,568,647,000	166,822,922,118	(4,745,724,882)	97
3. Belanja Modal	57,383,526,000	57,156,840,085	(226,685,915)	100	23,657,100,000	23,412,400,003	(244,699,997)	99
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Transfer ke Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 12

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:21 AM

lap_lra_face_es1_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Dana Transfer Umum	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
c. Dana Keistimewaan DIY	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d. Dana Otonomi Khusus	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Dana Desa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3. Hibah Kepada Daerah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**305,611,935,000**	**298,183,938,444**	**(7,427,996,556)**	**98**	**229,437,166,000**	**223,990,194,502**	**(5,446,971,498)**	**98**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/24 11:26 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	94,897,664	0	94,897,664	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91,039,000	159,287,249	0	159,287,249	174.97
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	91,039,000	254,184,913	0	254,184,913	279.2
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987,500,000	906,300,000	0	906,300,000	91.78
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	987,500,000	906,300,000	0	906,300,000	91.78
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	0	4,194,577	0	4,194,577	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	4,194,577	0	4,194,577	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	3,642,940	0	3,642,940	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	3,642,940	0	3,642,940	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,864,676	0	1,864,676	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	384,628,500	0	384,628,500	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	68,601,827	0	68,601,827	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	455,095,003	0	455,095,003	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,078,539,000	1,623,417,433	0	1,623,417,433	150.52
	JUMLAH PENDAPATAN	1,078,539,000	1,623,417,433	0	1,623,417,433	150.52

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 11:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	19,826,728,000	22,559,031,000	22,524,601,220	0	22,524,601,220	99.85	34,429,780
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	403,000	409,000	370,852	4,185	366,667	89.65	42,333
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,545,975,000	1,409,864,000	1,395,918,200	0	1,395,918,200	99.01	13,945,800
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	347,034,000	383,682,000	377,371,882	0	377,371,882	98.36	6,310,118
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,015,150,000	575,150,000	560,120,000	1,080,000	559,040,000	97.2	16,110,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,704,515,000	2,693,082,000	2,679,543,000	0	2,679,543,000	99.5	13,539,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	147,539,000	146,855,000	142,472,392	0	142,472,392	97.02	4,382,608
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	1,205,838,000	1,162,197,000	1,151,115,900	0	1,151,115,900	99.05	11,081,100
511129	Belanja Uang Makan PNS	4,986,161,000	3,450,574,000	3,346,775,000	0	3,346,775,000	96.99	103,799,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	792,285,000	598,975,000	571,290,000	1,850,042	569,439,958	95.07	29,535,042
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	31,571,628,000	32,979,819,000	32,749,578,446	2,934,227	32,746,644,219	99.29	233,174,781
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	1,545,301,000	1,863,426,000	1,588,767,000	0	1,588,767,000	85.26	274,659,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	1,545,301,000	1,863,426,000	1,588,767,000	0	1,588,767,000	85.26	274,659,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	33,116,929,000	34,843,245,000	34,338,345,446	2,934,227	34,335,411,219	98.54	507833781
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	17,300,494,000	17,759,387,000	17,583,078,338	0	17,583,078,338	99.01	176,308,662
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38,000,000	19,638,000	5,630,910	0	5,630,910	28.67	14,007,090
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,010,390,000	1,063,000,000	1,061,380,000	0	1,061,380,000	99.85	1,620,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	655,250,000	1,112,860,000	1,090,070,658	0	1,090,070,658	97.95	22,789,342
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,135,267,000	7,300,000	6,787,000	0	6,787,000	92.97	513,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	20,139,401,000	19,962,185,000	19,746,946,906	0	19,746,946,906	98.92	215,238,094
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	37,441,961,000	35,249,818,000	34,868,400,009	145,177,090	34,723,222,919	98.51	526,595,081
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,437,330,000	1,480,145,000	1,428,650,000	5,882,500	1,422,767,500	96.12	57,377,500
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,359,553,000	57,140,017,000	57,013,366,746	0	57,013,366,746	99.78	126,650,254
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1,297,050,000	77,682,000	77,099,051	0	77,099,051	99.25	582,949
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	309,123,000	306,479,400	0	306,479,400	99.14	2,643,600
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	100,000,000	99,922,645	0	99,922,645	99.92	77,355
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	71,535,894,000	94,356,785,000	93,793,917,851	151,059,590	93,642,858,261	99.24	713,926,739
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	360,588,000	1,122,501,000	1,113,099,234	0	1,113,099,234	99.16	9,401,766
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	225,500,000	225,500,000	224,572,311	0	224,572,311	99.59	927,689

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 11:23 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	43,663,000	1,008,000	991,500	0	991,500	98.36	16,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	629,751,000	1,349,009,000	1,338,663,045	0	1,338,663,045	99.23	10,345,955
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	2,556,000,000	4,926,263,000	4,915,783,369	0	4,915,783,369	99.79	10,479,631
522112	Belanja Langganan Telepon	42,720,000	19,720,000	15,998,869	0	15,998,869	81.13	3,721,131
522113	Belanja Langganan Air	88,200,000	179,967,000	174,849,000	0	174,849,000	97.16	5,118,000
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	4,972,400,000	4,912,305,000	4,882,320,988	0	4,882,320,988	99.39	29,984,012
522141	Belanja Sewa	5,691,259,000	6,891,040,000	6,885,398,320	0	6,885,398,320	99.92	5,641,680
522151	Belanja Jasa Profesi	17,343,750,000	13,748,954,000	13,282,057,742	92,348,000	13,189,709,742	95.93	559,244,258
522191	Belanja Jasa Lainnya	119,150,000	399,890,000	398,019,361	0	398,019,361	99.53	1,870,639
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,583,407,000	4,971,000	4,971,000	0	4,971,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	32,396,886,000	31,083,110,000	30,559,398,649	92,348,000	30,467,050,649	98.02	616,059,351
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,593,330,000	8,618,971,000	8,577,342,401	0	8,577,342,401	99.52	41,628,599
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	26,425,000	32,000,000	31,802,760	0	31,802,760	99.38	197,240
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	768,709,000	398,788,000	386,866,882	0	386,866,882	97.01	11,921,118
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,943,000,000	3,609,402,000	3,525,244,781	5,026,570	3,520,218,211	97.53	89,183,789
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	6,331,464,000	12,659,161,000	12,521,256,824	5,026,570	12,516,230,254	98.87	142,930,746
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34,505,505,000	45,651,417,000	43,311,823,423	2,386,641,935	40,925,181,488	89.65	4,726,235,512
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,726,080,000	307,102,000	273,680,000	4,050,000	269,630,000	87.8	37,472,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,624,216,000	8,016,395,000	7,882,779,746	97,653,209	7,785,126,537	97.12	231,268,463
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	38,855,801,000	53,974,914,000	51,468,283,169	2,488,345,144	48,979,938,025	90.75	4,994,975,975
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	169,889,197,000	213,385,164,000	209,428,466,444	2,736,779,304	206,691,687,140	96.86	6693476860
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6,402,441,000	10,509,856,000	10,435,942,730	0	10,435,942,730	99.3	73,913,270
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	6,402,441,000	10,509,856,000	10,435,942,730	0	10,435,942,730	99.3	73,913,270
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39,417,435,000	39,342,499,000	39,322,649,642	0	39,322,649,642	99.95	19,849,358
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	6,635,200,000	7,488,171,000	7,375,702,059	20,151,496	7,355,550,563	98.23	132,620,437
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	46,052,635,000	46,830,670,000	46,698,351,701	20,151,496	46,678,200,205	99.67	152,469,795
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	15,000,000	43,000,000	42,697,150	0	42,697,150	99.3	302,850
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	15,000,000	43,000,000	42,697,150	0	42,697,150	99.3	302,850

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 11:23 AM

Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	52,470,076,000	57,383,526,000	57,176,991,581	20,151,496	57,156,840,085	99.6	226685915
	JUMLAH BELANJA	255,476,202,000	305,611,935,000	300,943,803,471	2,759,865,027	298,183,938,444	97.57	7,427,996,556

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:16 AM
Halaman : 1
lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,112,396,477	1,128,400,247	(16,003,770)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,112,396,477	1,128,400,247	(16,003,770)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,112,396,477	1,128,400,247	(16,003,770)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	34,335,411,219	33,754,872,381	580,538,838	-
Beban Persediaan	1,350,986,302	3,096,062,207	(1,745,075,905)	-
Beban Barang dan Jasa	144,027,919,203	125,093,169,683	18,934,749,520	-
Beban Pemeliharaan	12,543,004,636	15,868,728,321	(3,325,723,685)	-
Beban Perjalanan Dinas	48,979,938,025	23,321,516,982	25,658,421,043	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:16 AM

lap_lo_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	27,311,880,952	25,588,253,739	1,723,627,213	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	268,549,140,337	226,722,603,313	41,826,537,024	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(267,436,743,860)	(225,594,203,066)	(41,842,540,794)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(1,198,966,902)	197,982,699	(1,396,949,601)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	94,897,664	197,982,699	(103,085,035)	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	1,293,864,566	0	1,293,864,566	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	386,493,176	767,395,386	(380,902,210)	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	386,493,176	767,395,386	(380,902,210)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(812,473,726)	965,378,085	(1,777,851,811)	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(268,249,217,586)	(224,628,824,981)	(43,620,392,605)	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(268,249,217,586)	(224,628,824,981)	(43,620,392,605)	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lpe_es1

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,454,096,342,965	1,444,031,040,202	10,065,302,763	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(268,249,217,586)	(224,628,824,981)	(43,620,392,605)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	246,013,929	(594,800,693)	840,814,622	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	(1,924,000)	1,924,000	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	246,013,929	(592,876,693)	838,890,622	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	308,802,371,349	235,288,928,437	73,513,442,912	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	40,799,167,692	10,065,302,763	30,733,864,929	-
EKUITAS AKHIR	1,494,895,510,657	1,454,096,342,965	40,799,167,692	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/24 11:23 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,135,267,000	7,300,000	6,787,000	0	6,787,000	92.97	513,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,135,267,000	7,300,000	6,787,000	0	6,787,000	92.97	513,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,297,050,000	77,682,000	77,099,051	0	77,099,051	99.25	582,949
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,297,050,000	77,682,000	77,099,051	0	77,099,051	99.25	582,949
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	43,663,000	1,008,000	991,500	0	991,500	98.36	16,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	43,663,000	1,008,000	991,500	0	991,500	98.36	16,500
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1,583,407,000	4,971,000	4,971,000	0	4,971,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,583,407,000	4,971,000	4,971,000	0	4,971,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,059,387,000	90,961,000	89,848,551	0	89,848,551	98.78	1112449
	JUMLAH BELANJA	4,059,387,000	90,961,000	89,848,551	0	89,848,551	98.78	1,112,449